

A Comparative Study of Foreign Investment Regulatory Framework and Negative Lists Between the People's Republic of China and Indonesia

author:

Natasha Pitoy¹ and Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

This legal research aims to compare and analyse differences between the Chinese and Indonesian foreign investment legal frameworks along with their respective negative lists, and to determine – among the differences found – what features of the Chinese foreign investment framework can be beneficially implemented to the Indonesian foreign investment framework, and what features of the Chinese negative lists can be strategically implemented to the Indonesian negative list.

This normative legal research is conducted to compare both foreign investment-related regulatory framework and discuss several key Ease of Doing Business (EoDB) influencing aspects of the framework, along with negative lists from both the People's Republic of China and Indonesia. Aside from analysing the historical and philosophical differences that influences the development of these legal frameworks, this research also examines substantial aspects such as, establishment procedures, post-establishment reporting obligations, tax, and labour, are compared between the People's Republic of China and Indonesia. Additionally, the Indonesian negative list is compared to the People's Republic of China's negative lists.

Conclusively, it is found that there are several key aspects of the People's Republic of China's regulatory framework and negative list that differs to the Indonesian regulatory framework and negative list. It is further found that these differences could be implemented in Indonesia to increase the EoDB rate in Indonesia, such as in implementing a more effective establishment and post-establishment procedures and obligations, along with additional innovative tax incentive, and labour regulations for foreign-invested platform service companies. Moreover, Indonesia could also adopt a negative list to further regulate the availability of sectors for foreign investment in Free Trade Zones.

Keywords: Foreign Investment, Negative List, EoDB, The People's Republic of China, Indonesia

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2018).

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Studi Perbandingan Kerangka Hukum Penanaman Modal Asing dan Daftar Negatif Investasi antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia

Penulis:

Natasha Pitoy¹ and Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan antara kerangka hukum penanaman modal asing serta daftar negatif investasi Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia, dan untuk menentukan – di antara perbedaan yang ditemukan – aspek-aspek kerangka hukum penanaman modal asing Republik Rakyat Tiongkok yang dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing di Indonesia, dan fitur apa dari daftar negatif investasi Republik Rakyat Tiongkok yang dapat diterapkan secara strategis ke daftar negatif investasi Indonesia.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk membandingkan kedua kerangka peraturan terkait investasi asing dan membahas beberapa aspek utama Ease of Doing Business (EoDB) yang mempengaruhi kerangka tersebut, bersama dengan daftar negatif investasi dari Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. Selain menganalisis perbedaan historis dan filosofis yang mempengaruhi perkembangan kerangka hukum tersebut, penelitian ini juga mengkaji aspek-aspek substantif seperti, prosedur pendirian perusahaan penanaman modal asing, kewajiban pelaporan pasca pendirian perusahaan, perpajakan, dan ketenagakerjaan, dibandingkan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. Selain itu, daftar negatif investasi Indonesia dibandingkan dengan daftar negatif investasi Republik Rakyat Tiongkok.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek utama dari kerangka peraturan dan daftar negatif Republik Rakyat Tiongkok berbeda dengan kerangka peraturan dan daftar negatif Indonesia. Terlebih lagi, ditemukan bahwa perbedaan tersebut dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan tingkat EoDB di Indonesia, seperti dalam menerapkan prosedur dan kewajiban pendirian dan pasca pembentukan yang lebih efektif, serta insentif pajak tambahan yang inovatif, dan peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan penyedia jasa platform. Selain itu, Indonesia juga dapat mengadopsi daftar negatif untuk mengatur lebih lanjut ketersediaan sektor-sektor untuk penanaman modal asing di Kawasan Ekonomi Khusus.

Kata Kunci: *Penanaman Modal Asing, Daftar Negatif Investasi, EoDB, Republik Rakyat Cina, Indonesia*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (SI IUP 2018).

² Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.